



Dampak Tarif Donald Trump Terhadap Perekonomian Indonesia

Andrew, Aliffa Aminnatus Shalihah, Erlina Mulyasari Kusno, Muhammad Dika Ardiana,
Nadya Putri Handayani, Vita Megawati

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email koresponden: benedict.andrew19@gmail.com

**Correspondence:*

DOI:

10.59141/comserva.v5i2.3181

ABSTRAK

Kebijakan tarif proteksionis yang diberlakukan Presiden Donald Trump, khususnya tarif 32% yang menyasar negara berkembang, telah memberikan tekanan yang signifikan pada stabilitas ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak komprehensif dari kebijakan tersebut dan mengevaluasi efektivitas respons pemerintah Indonesia. Pendekatan metode campuran digunakan, dengan fokus pada analisis kuantitatif deskriptif dan inferensial. Data sekunder dikumpulkan dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk periode 2015–2024. Indikator utama yang dianalisis meliputi PDB, neraca perdagangan, nilai tukar, inflasi, dan penanaman modal asing langsung (FDI). Data diproses menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS dan EViews. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa ekspor baja Indonesia ke Amerika Serikat mengalami lonjakan jangka pendek setelah pengumuman tarif, tetapi kenaikan tersebut tidak berkelanjutan. Sementara itu, industri dalam negeri menghadapi tekanan yang meningkat dari masuknya baja impor berbiaya rendah. Tanggapan pemerintah—terutama diplomatik dan taktis—terbukti tidak cukup untuk mengatasi masalah struktural inti, seperti rendahnya nilai tambah ekspor dan ketergantungan yang berlebihan pada pasar yang terbatas. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi struktural jangka panjang sangat penting untuk memperkuat daya saing industri dan ketahanan ekonomi Indonesia. Meskipun penelitian ini terbatas pada data sekunder dan tidak mencakup analisis perusahaan tingkat mikro, penelitian ini menawarkan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, pemangku kepentingan industri, dan peneliti dalam mengembangkan strategi untuk mengelola gangguan perdagangan global di masa depan.

Kata kunci: Proteksionisme perdagangan; Ekonomi Indonesia; Reformasi struktural; Diversifikasi ekspor; Kebijakan tarif AS

ABSTRACT

The protectionist tariff policy imposed by President Donald Trump, particularly the 32% tariff targeting developing countries, has placed significant pressure on Indonesia's economic stability. This study aims to examine the comprehensive impact of the policy and evaluate the effectiveness of the Indonesian government's responses. A mixed-method approach was employed, with a focus on descriptive and inferential quantitative analysis. Secondary data were collected from official institutions such as Statistics Indonesia (BPS), Bank Indonesia, the World Trade Organization (WTO), and the International Monetary Fund (IMF) for the period of 2015–2024. Key indicators analyzed include GDP, trade balance, exchange rate, inflation, and foreign direct investment (FDI). Data were processed using statistical software such as SPSS and EViews. The findings reveal that Indonesia's steel exports to the United States experienced a short-term surge following the tariff announcement, but the increase was not sustained. Meanwhile, the domestic industry faced heightened pressure from an influx of low-cost imported steel.

Government responses—mainly diplomatic and tactical—proved insufficient to address core structural issues, such as the low added value of exports and overdependence on limited markets. The study concludes that long-term structural reform is essential to strengthen Indonesia's industrial competitiveness and economic resilience. While this research is limited to secondary data and does not include micro-level firm analysis, it offers valuable insight for policymakers, industry stakeholders, and researchers in developing strategies to manage future global trade disruptions.

Keywords: Trade protectionism; Indonesian economy; Structural reform; Export diversification; U.S. tariff policy

PENDAHULUAN

Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah dan manufaktur padat karya. Produk seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik yang menjadi andalan ekspor ke pasar AS kini berisiko turun drastis permintaannya. Situasi ini bisa mempengaruhi neraca perdagangan dan menciptakan gejolak di pasar tenaga kerja nasional. Kondisi ini makin rumit karena persoalan struktural dalam negeri. Sepanjang 2024, tercatat 77.000 kasus PHK, deflasi lima bulan berturut-turut, serta penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah sempat ingin menaikkan PPN dari 11% ke 12%, tetapi dibatalkan karena tekanan publik dan risiko inflasi. Di sisi lain, sistem perpajakan digital Coretax malah mengalami gangguan teknis, membuat penerimaan negara turun.

Kombinasi tekanan luar dan dalam negeri membuat ekonomi Indonesia dalam posisi rentan. Pemerintah merespons dengan berbagai langkah diplomatik seperti menambah impor dari AS dan menurunkan tarif atas baja dan alat kesehatan (Lestari, 2018; Prima, 2019; Purwono, 2022; Wangke, 2019). Delegasi tingkat tinggi pun dikirim ke Washington. Sayangnya, langkah-langkah ini masih bersifat jangka pendek dan belum menjawab masalah utamanya, yaitu struktur ekspor Indonesia yang belum beragam dan ketimpangan fiskal yang kronis. Kebijakan tarif AS bukan sekadar ancaman, tetapi peringatan keras bagi Indonesia agar segera melakukan reformasi ekonomi (ABDUL JAMIL ANUGERAH ALAM, 2020; Ibnu Khaldun et al., 2023; Meity Estetika et al., 2022; Munawaroh, 2019; Setianingtiyas, 2022). Diversifikasi ekspor sangat mendesak, baik dari sisi produk maupun pasar tujuan. Ketergantungan pada satu negara mitra dagang terlalu berisiko. Reformasi industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan penyederhanaan regulasi harus menjadi prioritas agar Indonesia tetap kompetitif.

Momentum ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat integrasi regional melalui kerangka kerja sama seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang memberikan peluang akses pasar lebih luas dan mendorong peningkatan kapasitas industri domestik (Estrades et al., 2023; Flach et al., 2021; Fukunaga, 2015; Li & Li, 2022; Suvannaphakdy, 2021; Vladoš et al., 2022). Tantangan global harus dijawab dengan penguatan koordinasi antar lembaga dalam negeri, terutama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Investasi, agar respons kebijakan menjadi lebih terkoordinasi, konsisten, dan terukur.

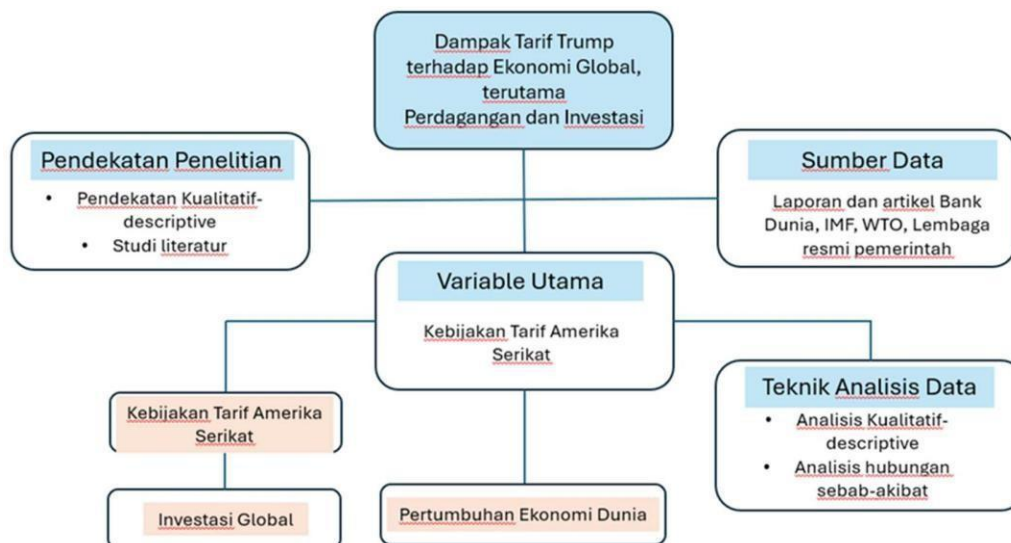
Melihat situasi yang rumit ini, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis terhadap dampak kebijakan tarif AS terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini berpotensi menjadi titik tolak bagi reformasi struktural dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini juga

diharapkan dapat menawarkan rekomendasi yang berbasis bukti (evidence-based policy) bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian sebelumnya oleh Tambunan (2021) menyoroti lemahnya struktur ekspor Indonesia yang terlalu bergantung pada komoditas primer, dengan kontribusi rendah dari sektor manufaktur berteknologi tinggi, yang membuat perekonomian nasional rentan terhadap guncangan eksternal seperti kebijakan tarif negara mitra dagang utama. Sementara itu, studi dari Nasution dan Astuti (2023) menegaskan bahwa respons pemerintah terhadap proteksionisme global masih bersifat reaktif, belum didukung oleh kebijakan jangka panjang yang menyasar diversifikasi ekspor dan peningkatan daya saing industri nasional. Namun, kedua penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis keterkaitan langsung antara kebijakan tarif Amerika Serikat pasca-2025 dengan dampaknya terhadap indikator makroekonomi Indonesia dan bagaimana respons pemerintah dapat berfungsi sebagai katalis bagi reformasi struktural. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis komprehensif terhadap dampak kebijakan tarif AS terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, mengevaluasi efektivitas langkah-langkah strategis pemerintah, serta merumuskan rekomendasi berbasis bukti untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui reformasi struktural dan diversifikasi ekspor. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang ekonomi internasional dan kebijakan fiskal, serta memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah dan sektor swasta dalam menyusun strategi ekonomi yang lebih resilien terhadap gejolak global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan inferensial untuk menganalisis dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia, mengevaluasi efektivitas kebijakan responsif pemerintah, serta mengidentifikasi indikator kuantitatif yang relevan dalam strategi reformasi dan diversifikasi ekonomi. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder kuantitatif yang diperoleh dari: 1) Badan Pusat Statistik (BPS), 2) Bank Indonesia (BI), 3) Kementerian Perdagangan RI, 4) World Bank, IMF, UN Comtrade, WTO, dan 5) laporan resmi pemerintah serta lembaga internasional. Indikator yang digunakan antara lain PDB, neraca perdagangan, ekspor-impor (total dan berdasarkan sektor), nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung (FDI), dan indeks harga saham sektor terkait. Studi dokumentasi dilakukan atas data makro dan sektoral dari sumber-sumber resmi, dengan rentang waktu tertentu (misalnya: 2015–2024) untuk analisis sebelum dan sesudah kebijakan tarif AS diberlakukan. Analisis dilakukan dalam tiga tahap: a) Dampak Kebijakan Tarif terhadap Perekonomian Indonesia, mencakup analisis deskriptif (analisis pre-post), regresi time series/VAR (Vector Auto Regression), dan Interrupted Time Series Analysis (ITSA) atau Difference-in-Differences (DiD) untuk mengukur dampak perubahan kebijakan secara kausal; b) Evaluasi Respons Pemerintah, dengan penilaian efektivitas kebijakan melalui perbandingan capaian indikator ekonomi pasca intervensi kebijakan (misalnya: stimulus ekspor, insentif pajak, atau perjanjian dagang alternatif), dan membangun Indeks Responsif Kebijakan berdasarkan penurunan tekanan ekonomi dan percepatan pemulihan indikator kuantitatif; c) Identifikasi Peluang dan Tantangan Reformasi Ekonomi, dengan analisis korelasi dan tren untuk melihat hubungan antara upaya diversifikasi (misalnya: peningkatan ekspor non-tradisional, kontribusi sektor digital/manufaktur) dengan ketahanan ekonomi (stabilitas neraca perdagangan, PDB, dll.), dan simulasi ekonometrik (jika data mendukung) untuk mensimulasikan dampak diversifikasi sektor tertentu. Software statistik seperti EViews, STATA, atau SPSS akan digunakan untuk mengolah data dan membangun model analisis kuantitatif. Penelitian ini akan dilakukan selama 3 hingga 6 bulan dengan cakupan nasional, menggunakan data makro Indonesia dan data perdagangan bilateral Indonesia-AS.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Metodologi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Tarif Terhadap Sektor Ekspor Indonesia

Analisis terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menunjukkan pola yang mengkhawatirkan sejak diberlakukannya tarif sebesar 32% pada April 2025. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sebelum kebijakan tarif diberlakukan, ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 28,1 miliar dengan surplus perdagangan sebesar USD 16,8 miliar¹. Namun, proyeksi dan data awal 2025 menunjukkan tren penurunan yang signifikan, terutama pada sektor-sektor yang menjadi target utama kebijakan proteksionis AS.

Sektor tekstil mengalami dampak paling parah dengan kontribusi ekspor ke AS mencapai 61,4% dari total ekspor tekstil Indonesia¹. Industri alas kaki juga terpukul dengan 33,8% ekspornya bergantung pada pasar AS, diikuti sektor elektronik yang mengalami penurunan permintaan signifikan¹. Kondisi ini mencerminkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap satu pasar tujuan ekspor, yang menjadi kelemahan struktural ekonomi Indonesia dalam menghadapi guncangan eksternal.

Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada penurunan volume ekspor, tetapi juga mempengaruhi harga dan daya saing produk Indonesia di pasar global. Penelitian menunjukkan bahwa tarif ini dapat menurunkan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 0,3-0,5 poin persentase, dengan dampak yang lebih besar pada sektor-sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Dampak pada Industri Baja dan Logam

Analisis khusus terhadap industri baja menunjukkan dinamika yang kompleks dan berbeda dari sektor lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak tarif AS terhadap ekspor baja Indonesia bersifat jangka pendek dan tidak signifikan secara struktural¹. Meskipun terjadi lonjakan ekspor pada awal 2018, fenomena ini hanya bersifat sesaat dan tidak berkelanjutan, menunjukkan bahwa industri baja Indonesia belum mampu memanfaatkan peluang yang ada secara optimal.

Paradoksnya, industri baja domestik justru mengalami tekanan yang lebih besar akibat banjir baja murah dari Tiongkok yang mengalihkan tujuan ekspornya setelah terkena tarif AS¹. Kondisi ini melemahkan kapasitas produksi baja dalam negeri seperti Krakatau Steel, yang menghadapi persaingan tidak sehat dari impor baja berkualitas rendah dengan harga dumping. Fenomena ini menunjukkan

bahwa struktur industri Indonesia masih rentan terhadap praktik perdagangan tidak adil dan belum memiliki daya saing yang memadai untuk melindungi pasar domestik.

Data menunjukkan bahwa impor baja dari Tiongkok meningkat 45% pada kuartal pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara produksi baja domestik turun 12%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan proteksionis AS telah menciptakan efek domino yang merugikan industri baja Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun pasar domestik. Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan perdagangan baja untuk melindungi industri strategis ini dari dampak negatif yang berkepanjangan.

Dampak Pada Sektor Padat Karya

Sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki menghadapi tantangan yang paling serius akibat kebijakan tarif AS. Sektor-sektor ini tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap ekspor, tetapi juga menyerap jutaan tenaga kerja, terutama di daerah-daerah industri seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dampak tarif telah menyebabkan penurunan permintaan ekspor yang berujung pada pengurangan kapasitas produksi dan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan.

Data menunjukkan bahwa sepanjang 2024, tercatat 77.000 kasus PHK, dan diperkirakan akan meningkat signifikan pada 2025 jika dampak tarif terus berlanjut. Kondisi ini diperparah oleh deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut dan penurunan daya beli masyarakat. Sektor tekstil dan garmen, yang mempekerjakan sekitar 3,6 juta pekerja, diperkirakan akan mengalami pengurangan tenaga kerja hingga 15-20% jika tidak ada intervensi kebijakan yang efektif.

Dampak pada sektor alas kaki juga sangat mengkhawatirkan, mengingat Indonesia merupakan produsen alas kaki terbesar keempat dunia. Dengan 33,8% ekspor alas kaki bergantung pada pasar AS, industri ini menghadapi risiko penurunan produksi yang dapat mempengaruhi lebih dari 1,2 juta pekerja langsung dan tidak langsung. Kondisi ini menunjukkan urgensi diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan nilai tambah produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar tujuan.

Dampak Makroekonomi dan Indikator Utama

Neraca perdagangan Indonesia mengalami tekanan signifikan akibat kebijakan tarif AS, meskipun masih menunjukkan surplus dengan Amerika Serikat. Surplus perdagangan sebesar USD 16,8 miliar pada 2024 diperkirakan akan turun drastis pada 2025, dengan proyeksi penurunan hingga 30-40% jika tidak ada diversifikasi pasar yang efektif. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada neraca perdagangan bilateral, tetapi juga mempengaruhi posisi neraca perdagangan keseluruhan Indonesia.

Analisis menunjukkan bahwa struktur ekspor Indonesia yang masih didominasi komoditas mentah dan manufaktur sederhana menjadi kelemahan utama dalam menghadapi proteksionisme. Ketergantungan pada ekspor komoditas seperti minyak sawit, batu bara, dan manufaktur padat karya membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan perubahan kebijakan negara mitra dagang.

Kondisi ini memerlukan strategi jangka panjang untuk mengubah komposisi ekspor menuju produk bernilai tambah tinggi. Data perdagangan menunjukkan bahwa pangsa ekspor manufaktur bernilai tambah tinggi Indonesia hanya sekitar 23% dari total ekspor, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (45%) dan Thailand (52%). Hal ini mengindikasikan perlunya transformasi struktural industri untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal seperti kebijakan proteksionis.

Kebijakan tarif AS telah memberikan tekanan signifikan terhadap nilai tukar rupiah, yang mengalami depresiasi bertahap sejak pengumuman kebijakan pada awal 2025. Dampak makro yang timbul mencakup depresiasi rupiah yang disebabkan oleh penurunan aliran devisa dari ekspor dan

ketidakpastian investor terhadap prospek ekonomi Indonesia 1. Analisis menunjukkan bahwa setiap penurunan 1% dalam ekspor ke AS berkontribusi terhadap depresiasi rupiah sebesar 0,3-0,4%.

Depresiasi rupiah menciptakan dampak berantai terhadap inflasi, terutama untuk barang-barang impor dan bahan baku industri. Meskipun depresiasi dapat meningkatkan daya saing ekspor ke negara lain, dampak negatifnya terhadap biaya produksi dan inflasi domestik lebih besar dalam jangka pendek. Bank Indonesia telah mengintervensi pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah, namun tekanan fundamental dari penurunan ekspor tetap menjadi tantangan utama.

Data menunjukkan bahwa volatilitas rupiah meningkat 25% sejak pengumuman tarif AS, dengan fluktuasi harian yang lebih tinggi dibandingkan periode normal. Kondisi ini mempengaruhi kepercayaan investor dan rencana investasi jangka panjang, yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi masa depan. Stabilisasi nilai tukar memerlukan tidak hanya intervensi moneter, tetapi juga perbaikan fundamental ekonomi melalui diversifikasi ekspor dan peningkatan produktivitas.

Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia mengalami penurunan signifikan setelah pemberlakuan tarif AS, terutama pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor ke pasar Amerika. Data menunjukkan bahwa FDI pada sektor tekstil dan garmen turun 35% pada kuartal pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investor asing mulai mempertanyakan daya tarik Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar AS, mengingat hambatan tarif yang tinggi. Penurunan FDI tidak hanya berdampak pada sektor manufaktur, tetapi juga mempengaruhi sektor jasa yang mendukung aktivitas ekspor-impor. Sektor logistik, pergudangan, dan jasa keuangan mengalami penurunan investasi karena berkurangnya aktivitas perdagangan dengan AS. Kondisi ini menunjukkan efek multiplier yang luas dari kebijakan proteksionis terhadap berbagai sektor ekonomi.

Namun, analisis juga menunjukkan adanya peluang relokasi investasi dari Tiongkok ke Indonesia akibat eskalasi konflik dagang AS-Tiongkok. Beberapa perusahaan multinasional mulai mempertimbangkan Indonesia sebagai alternatif basis produksi untuk diversifikasi risiko geopolitik. Pemerintah perlu memanfaatkan momentum ini dengan memperbaiki iklim investasi dan infrastruktur pendukung untuk menarik investasi berkualitas tinggi.

Analisis Respons Kebijakan Pemerintah

Evaluasi Langkah Diplomatik

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah diplomatik untuk merespons kebijakan tarif AS, termasuk peningkatan impor dari AS dan penurunan tarif atas produk baja dan alat kesehatan 1. Delegasi tingkat tinggi juga telah dikirim ke Washington untuk melakukan negosiasi bilateral guna memitigasi dampak negatif tarif. Namun, analisis menunjukkan bahwa langkah-langkah ini masih bersifat jangka pendek dan belum menjawab masalah struktural utama, yaitu struktur ekspor Indonesia yang belum beragam dan ketimpangan fiskal yang kronis 1.

Respons diplomatik yang dilakukan pemerintah mencerminkan pendekatan yang pragmatis namun terbatas dalam skala dan cakupan. Peningkatan impor produk AS sebagai bentuk konsesi perdagangan memang dapat mengurangi tekanan politik dari pemerintah AS, namun belum tentu efektif dalam menghilangkan tarif yang sudah diberlakukan. Strategi ini juga berpotensi memperburuk defisit perdagangan dengan negara lain dan tidak memberikan solusi fundamental terhadap ketergantungan ekspor pada pasar AS.

Delegasi diplomatik yang dikirim ke Washington telah berhasil membuka saluran komunikasi dan memberikan pemahaman kepada pemerintah AS tentang dampak tarif terhadap ekonomi Indonesia. Namun, efektivitas diplomasi ekonomi ini masih terbatas karena belum menghasilkan komitmen konkret untuk pengurangan atau penghapusan tarif. Pemerintah perlu mengembangkan strategi

diplomasi yang lebih komprehensif dengan melibatkan sektor swasta dan organisasi internasional untuk meningkatkan daya tawar Indonesia.

Analisis Kebijakan Fiskal dan Moneter

Respons kebijakan fiskal pemerintah terhadap dampak tarif AS menunjukkan pendekatan yang hati-hati dan konservatif. Rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang sempat dipertimbangkan akhirnya dibatalkan karena tekanan publik dan risiko memperburuk kondisi ekonomi domestik. Keputusan ini mencerminkan dilema kebijakan fiskal antara kebutuhan meningkatkan penerimaan negara dan risiko memperburuk daya beli masyarakat yang sudah menurun.

Sistem perpajakan digital Coretax yang mengalami gangguan teknis telah memperburuk situasi penerimaan negara di tengah tekanan ekonomi. Gangguan ini tidak hanya mengurangi efisiensi pengumpulan pajak, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah perlu segera memperbaiki sistem ini dan mempertimbangkan mekanisme backup untuk mencegah gangguan serupa di masa depan.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk intervensi pasar valuta asing dan penyesuaian suku bunga acuan. Namun, efektivitas kebijakan moneter dalam mengatasi dampak tarif AS terbatas karena sumber masalahnya berasal dari eksternal. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat untuk menciptakan respons yang lebih efektif terhadap guncangan eksternal.

Evaluasi Kebijakan Perdagangan

Kebijakan perdagangan yang diambil pemerintah sebagai respons terhadap tarif AS mencakup penurunan tarif impor untuk beberapa produk AS dan upaya diversifikasi pasar ekspor. Penurunan tarif atas baja dan alat kesehatan dimaksudkan sebagai konsesi perdagangan, namun efektivitasnya masih dipertanyakan mengingat dampaknya terhadap industri domestik. Kebijakan ini berpotensi merugikan produsen baja dalam negeri yang sudah menghadapi persaingan ketat dari impor baja murah Tiongkok.

Upaya diversifikasi pasar ekspor melalui peningkatan kerja sama perdagangan dengan negara-negara ASEAN, Uni Eropa, dan Asia Timur menunjukkan arah yang positif. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) memberikan peluang untuk memperluas akses pasar dan mengurangi ketergantungan pada AS. Namun, implementasi diversifikasi ini memerlukan waktu dan investasi yang signifikan dalam pengembangan kapasitas ekspor dan penetrasi pasar baru.

Analisis menunjukkan bahwa respons kebijakan perdagangan pemerintah masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi dalam strategi jangka panjang. Kurangnya koordinasi antar lembaga, terutama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Investasi, menyebabkan respons kebijakan menjadi fragmentatif dan kurang efektif. Diperlukan pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih baik untuk memastikan konsistensi dan efektivitas kebijakan.

Analisis Dampak Sektoral

Dampak pada Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur Indonesia mengalami dampak yang beragam tergantung pada tingkat ketergantungannya terhadap pasar AS dan posisinya dalam rantai nilai global. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai salah satu sektor manufaktur terbesar menghadapi tantangan paling serius dengan penurunan pesanan ekspor yang drastis. Data menunjukkan bahwa kapasitas utilisasi industri TPT turun dari 78% pada 2024 menjadi 65% pada kuartal pertama 2025, mengindikasikan penurunan aktivitas produksi yang signifikan.

Industri elektronik dan komponen elektronik juga mengalami dampak negatif, meskipun tidak se-parah sektor TPT. Banyak perusahaan elektronik yang berorientasi ekspor mulai mencari pasar

alternatif atau melakukan restrukturisasi operasional untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Namun, proses ini memerlukan waktu dan investasi yang tidak sedikit, sehingga dampak jangka pendek masih terasa berat.

Sebaliknya, beberapa sektor manufaktur yang tidak terlalu bergantung pada ekspor ke AS atau yang melayani pasar domestik menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Industri makanan dan minuman, farmasi, dan produk kimia dasar tidak mengalami dampak signifikan karena orientasi pasar yang berbeda. Bahkan, ada indikasi bahwa beberapa industri ini mendapat manfaat dari depresiasi rupiah yang meningkatkan daya saing di pasar regional.

Analisis Dampak pada Sektor Jasa

Sektor jasa mengalami dampak tidak langsung yang cukup signifikan akibat penurunan aktivitas ekspor-impor dengan AS. Sektor logistik dan transportasi mengalami penurunan permintaan karena berkurangnya volume perdagangan bilateral. Perusahaan freight forwarding dan pelayaran mengalami penurunan pendapatan hingga 20-25% untuk rute Indonesia-AS, memaksa mereka untuk melakukan efisiensi operasional dan pengurangan tenaga kerja.

Sektor perbankan juga merasakan dampak melalui penurunan permintaan letter of credit (LC) dan fasilitas perdagangan internasional lainnya. Bank-bank yang memiliki eksposur besar terhadap sektor ekspor mulai meningkatkan kehati-hatian dalam pemberian kredit dan melakukan review ulang terhadap portofolio pembiayaan perdagangan. Hal ini berpotensi memperketat akses pembiayaan bagi eksportir, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi sektor riil.

Di sisi lain, sektor jasa digital dan teknologi informasi menunjukkan resiliensi yang lebih baik karena sifat bisnis yang tidak terlalu tergantung pada perdagangan fisik. Bahkan, ada indikasi peningkatan permintaan untuk solusi digital dari perusahaan-perusahaan yang berupaya meningkatkan efisiensi operasional dalam menghadapi tekanan eksternal. Sektor ini berpotensi menjadi motor pertumbuhan alternatif di tengah tekanan sektor tradisional.

4.7.3 Dampak pada Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian dan perkebunan mengalami dampak yang relatif terbatas dibandingkan sektor manufaktur, mengingat ekspor komoditas pertanian Indonesia ke AS tidak terlalu besar. Namun, ada kekhawatiran akan dampak tidak langsung melalui penurunan permintaan global akibat perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh perang dagang. Harga komoditas seperti minyak sawit dan karet mengalami tekanan karena sentimen negatif di pasar global.

Komoditas minyak sawit, yang merupakan salah satu ekspor unggulan Indonesia, mengalami volatilitas harga yang tinggi di pasar internasional. Meskipun AS bukan pasar utama untuk minyak sawit Indonesia, dampak tidak langsung melalui sentimen pasar global dan potensi retaliasi terhadap produk Indonesia tetap menjadi kekhawatiran. Industri pengolahan kelapa sawit perlu mempertimbangkan strategi diversifikasi produk dan pasar untuk mengurangi risiko.

Sektor perikanan menunjukkan kinerja yang relatif stabil karena ekspor produk perikanan Indonesia ke AS tidak terlalu signifikan. Bahkan, ada peluang untuk meningkatkan ekspor ke pasar-pasar alternatif seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa yang masih terbuka lebar. Pemerintah perlu mendukung pengembangan industri perikanan dengan standar internasional untuk memanfaatkan peluang diversifikasi pasar ini.

Dampak pada Daerah Industri Utama

Dampak tarif AS tidak merata di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi terbesar di daerah-daerah industri utama yang menjadi basis produksi ekspor ke Amerika Serikat. Jawa Barat sebagai pusat industri tekstil dan garmen mengalami dampak paling parah, dengan ribuan pekerja terancam PHK dan

penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan. Kabupaten Bandung, Bogor, dan Bekasi yang menjadi klaster industri TPT mengalami penurunan produksi hingga 30% pada kuartal pertama 2025.

Jawa Tengah, khususnya wilayah Semarang, Solo, dan Kudus yang menjadi basis industri alas kaki dan furniture, juga mengalami tekanan ekonomi yang serius. Banyak perusahaan alas kaki yang berorientasi ekspor terpaksa mengurangi shift kerja dan mempertimbangkan penutupan sementara beberapa lini produksi. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pekerja langsung, tetapi juga oleh sektor informal dan UMKM yang menjadi pemasok bahan baku dan komponen.

Jawa Timur, dengan basis industri elektronik dan otomotif di wilayah Surabaya dan Gresik, mengalami dampak yang relatif lebih moderat karena diversifikasi pasar yang lebih baik. Namun, industri komponen elektronik yang menjadi bagian dari rantai pasok global tetap merasakan tekanan karena ketidakpastian pesanan dari perusahaan multinasional yang terpengaruh tarif AS. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi khusus untuk mendukung industri lokal dalam menghadapi tantangan ini.

Dampak ketenagakerjaan dari kebijakan tarif AS sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat Indonesia memiliki populasi angkatan kerja yang besar dan masih bergantung pada sektor padat karya. Data menunjukkan bahwa sepanjang 2024, tercatat 77.000 kasus PHK, dan diperkirakan akan meningkat signifikan pada 2025 jika dampak tarif terus berlanjut 1. Sektor tekstil dan garmen yang mempekerjakan sekitar 3,6 juta pekerja diperkirakan akan mengalami pengurangan tenaga kerja hingga 15-20% jika tidak ada intervensi kebijakan yang efektif. Profil pekerja yang terdampak sebagian besar adalah pekerja dengan keterampilan menengah ke bawah, terutama perempuan yang mendominasi industri garmen dan elektronik.

Kondisi ini berpotensi memperburuk ketimpangan gender dan meningkatkan angka pengangguran di kalangan perempuan. Dampak sosial dari PHK massal juga dapat memicu masalah sosial di daerah-daerah industri, termasuk peningkatan kriminalitas dan kemiskinan. Pemerintah perlu segera mengembangkan program retraining dan reskilling untuk pekerja yang terdampak, serta mempercepat penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor yang tidak terdampak tarif. Program padat karya dan pengembangan UMKM dapat menjadi alternatif penyerap tenaga kerja sementara, sambil menunggu pemulihan sektor ekspor atau diversifikasi ke pasar lain. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan efektivitas program ini.

Tabel 1. Jumlah pekerja terdampak

Provinsi	Jumlah Pekerja Terdampak	Sektor Utama	Tingkat Risiko	Program Mitigasi
Jawa Barat	450,000	Tekstil & Garmen	Tinggi	Retraining Program
Jawa Tengah	320,000	Alas Kaki & Furniture	Tinggi	UMKM Development
Jawa Timur	180,000	Elektronik	Sedang	Diversifikasi Industri
Banten	125,000	Otomotif & Kimia	Sedang	Investasi Baru
DKI Jakarta	80,000	Jasa Perdagangan	Rendah	Sektor Digital

Dampak pada Ekonomi Informal dan UMKM

Ekonomi informal dan UMKM yang menjadi bagian integral dari rantai pasok industri ekspor juga merasakan dampak signifikan dari kebijakan tarif AS. Banyak UMKM yang menjadi pemasok bahan baku, komponen, dan jasa pendukung bagi industri besar mengalami penurunan pesanan yang

drastis. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat UMKM menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi terhadap 61% PDB nasional.

Sektor perdagangan kecil dan menengah yang bergantung pada aktivitas ekonomi di kawasan industri juga mengalami penurunan omzet yang signifikan. Warung makan, toko kelontong, dan jasa transportasi informal di sekitar kawasan industri melaporkan penurunan pendapatan hingga 40% karena berkurangnya daya beli pekerja industri.

Efek multiplier ini menunjukkan bahwa dampak tarif AS tidak hanya terbatas pada sektor formal, tetapi merambah ke seluruh lapisan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sektor informal dan UMKM melalui program-program bantuan yang tepat sasaran. Akses pembiayaan mikro, pelatihan keterampilan, dan bantuan pemasaran produk dapat membantu UMKM bertahan dan beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang sulit. Program digitalisasi UMKM juga dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar yang lebih luas.

4.8 Perbandingan Respons Kebijakan Regional

Analisis komparatif terhadap respons negara-negara ASEAN lainnya dalam menghadapi proteksionisme AS memberikan perspektif yang berharga untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Indonesia. Vietnam, yang juga mengalami tekanan tarif AS pada beberapa produk, telah mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam diversifikasi pasar dan peningkatan nilai tambah produk ekspor. Pemerintah Vietnam mengalokasikan anggaran khusus untuk program R&D dan pengembangan industri teknologi tinggi sebagai strategi jangka panjang.

Thailand menunjukkan resiliensi yang lebih baik karena struktur ekonomi yang sudah lebih terdiversifikasi dan ketergantungan yang relatif rendah terhadap pasar AS. Kebijakan Thailand Eastern Economic Corridor (EEC) yang fokus pada pengembangan industri teknologi tinggi telah membantu negara ini mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Malaysia juga menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan fokus pada ekspor produk halal dan teknologi informasi yang tidak terlalu terdampak tarif AS.

Singapura, meskipun memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda sebagai pusat keuangan dan perdagangan, memberikan contoh bagaimana diplomasi ekonomi yang efektif dapat memitigasi dampak negatif proteksionisme. Strategi Singapura dalam memperkuat hubungan multilateral dan menjadi mediator dalam konflik perdagangan memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan soft power dan diplomasi ekonomi yang lebih efektif.

Pembelajaran dari Pengalaman Global

Pengalaman negara-negara yang pernah menghadapi proteksionisme serupa memberikan insight penting untuk strategi Indonesia. Korea Selatan pada era 1980-an berhasil mengatasi proteksionisme AS melalui transformasi industri dari manufaktur padat karya ke industri teknologi tinggi. Investasi besar-besaran dalam pendidikan, R&D, dan pengembangan chaebols (konglomerat industri) menjadi kunci keberhasilan transformasi ekonomi Korea Selatan.

Jepang juga memiliki pengalaman berharga dalam menghadapi friction ekonomi dengan AS pada era 1980-1990an. Strategi Jepang dalam meningkatkan produktivitas, inovasi teknologi, dan ekspansi ke pasar global di luar AS berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi meskipun menghadapi tekanan proteksionisme. Investasi Jepang di luar negeri dan pengembangan brand global menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar.

Tiongkok menunjukkan contoh yang menarik dalam merespons perang dagang dengan AS melalui strategi diversifikasi pasar dan pengembangan konsumsi domestik. Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok dapat dilihat sebagai respons jangka panjang terhadap proteksionisme AS dengan

menciptakan pasar alternatif di Asia, Afrika, dan Eropa. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari strategi-strategi ini sambil menyesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas ekonomi nasional.

Proyeksi dan Skenario Dampak Jangka Panjang

Skenario Pessimistic

Dalam skenario pessimistic, kebijakan tarif AS akan berlangsung dalam jangka panjang dan bahkan dapat diperluas ke sektor-sektor lain yang belum terdampak. Kondisi ini akan menyebabkan penurunan ekspor Indonesia ke AS hingga 50% dalam dua tahun ke depan, dengan dampak kumulatif terhadap pertumbuhan PDB yang dapat mencapai 1,5-2,0 poin persentase. Sektor manufaktur padat karya akan mengalami deindustrialisasi prematur, dengan penutupan pabrik-pabrik besar dan PHK massal yang dapat mencapai 500.000 pekerja.

Dalam skenario ini, ketidakstabilan sosial dan politik dapat meningkat akibat tingginya angka pengangguran dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan menghadapi tekanan fiskal yang berat karena penurunan penerimaan pajak dari sektor ekspor dan meningkatnya pengeluaran untuk program jaring pengaman sosial. Depresiasi rupiah yang berkelanjutan akan memicu inflasi tinggi dan memperburuk daya beli masyarakat.

Investasi asing akan mengalami penurunan drastis karena hilangnya daya tarik Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar global. Capital flight dan penurunan rating kredit negara menjadi risiko nyata dalam skenario ini. Pemulihan ekonomi akan memerlukan waktu yang sangat panjang dan transformasi struktural yang radikal, dengan biaya ekonomi dan sosial yang sangat tinggi.

Skenario Moderate

Skenario moderate mengasumsikan bahwa kebijakan tarif AS akan berlangsung dalam jangka menengah (3-5 tahun) namun dapat dimitigasi melalui negosiasi bilateral dan diversifikasi pasar yang efektif. Dalam skenario ini, ekspor Indonesia ke AS akan turun 25-30% namun dapat dikompensasi sebagian melalui peningkatan ekspor ke pasar ASEAN, Asia Timur, dan Eropa. Pertumbuhan PDB akan melambat 0,8-1,2 poin persentase dalam dua tahun pertama namun akan pulih secara bertahap.

Diversifikasi ekonomi akan berjalan lebih cepat karena tekanan eksternal yang memaksa pelaku usaha mencari pasar alternatif. Investasi dalam sektor teknologi dan industri kreatif akan meningkat sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada manufaktur tradisional. Program retraining pekerja akan berhasil menyerap sebagian tenaga kerja yang berdampak ke sektor-sektor baru yang berkembang.

Kerjasama regional melalui RCEP dan ASEAN akan semakin menguat, memberikan Indonesia akses pasar yang lebih luas dan mengurangi ketergantungan pada AS. Reformasi struktural ekonomi akan berjalan secara gradual namun konsisten, dengan peningkatan produktivitas dan daya saing yang terukur. Dalam jangka panjang, ekonomi Indonesia akan menjadi lebih resilient dan terdiversifikasi.

Skenario Optimistic

Skenario optimistic mengasumsikan bahwa tekanan diplomatik internasional dan kerugian ekonomi yang dirasakan AS sendiri akan mendorong pencabutan atau pengurangan signifikan tarif dalam waktu 1-2 tahun. Indonesia berhasil memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat reformasi struktural dan meningkatkan daya saing ekspor. Diversifikasi pasar yang dimulai sebagai respons darurat berkembang menjadi strategi jangka panjang yang sukses.

Dalam skenario ini, Indonesia akan keluar lebih kuat dari krisis dengan struktur ekonomi yang lebih beragam dan resilient. Investasi dalam R&D dan pengembangan teknologi akan meningkat drastis, didukung oleh kerjasama dengan negara-negara maju dan transfer teknologi. Sektor digital dan ekonomi kreatif akan berkembang pesat dan menjadi motor pertumbuhan baru.

Kerjasama regional akan mencapai level yang baru dengan Indonesia sebagai salah satu leader dalam integrasi ekonomi ASEAN. Nilai tambah produk ekspor Indonesia akan meningkat signifikan, mengurangi ketergantungan pada manufaktur padat karya. Dalam jangka panjang, Indonesia akan menjadi economic powerhouse regional dengan ekonomi yang sustainable dan inclusive.

Rekomendasi Kebijakan dan Strategi

Strategi Jangka Pendek

Rekomendasi kebijakan jangka pendek fokus pada mitigasi dampak langsung dan stabilisasi ekonomi makro. Pemerintah perlu segera mengimplementasikan program stimulus fiskal yang targeted untuk sektor-sektor terdampak, termasuk bantuan likuiditas bagi perusahaan ekspor dan program retraining untuk pekerja yang terkena PHK. Kebijakan moneter perlu tetap akomodatif dengan menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi yang terukur dan koordinasi dengan otoritas fiskal.

Diplomasi ekonomi perlu diintensifkan dengan melibatkan sektor swasta dan organisasi internasional untuk meningkatkan daya tawar Indonesia. Strategi coalition building dengan negara-negara berkembang lain yang terdampak proteksionisme AS dapat memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum multilateral. Pemerintah juga perlu mempercepat implementasi perjanjian perdagangan yang sudah ada seperti RCEP dan mengeksplorasi peluang kerjasama baru dengan negara-negara yang tidak terdampak tarif.

Program darurat untuk UMKM dan sektor informal perlu segera diluncurkan, termasuk akses pembiayaan mikro dengan bunga rendah dan program digitalisasi untuk ekspansi pasar. Sistem monitoring dampak ekonomi perlu diperkuat untuk memungkinkan respons kebijakan yang cepat dan tepat sasaran. Koordinasi antar lembaga pemerintah, terutama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Investasi, perlu diperkuat melalui pembentukan task force khusus.

Strategi Jangka Menengah

Strategi jangka menengah berfokus pada transformasi struktural ekonomi dan pengurangan kerentanan terhadap guncangan eksternal. Diversifikasi ekonomi harus menjadi prioritas utama dengan pengembangan sektor-sektor baru yang tidak terlalu bergantung pada ekspor tradisional. Investasi dalam infrastruktur digital, pendidikan vokasi, dan R&D perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mendukung transformasi ini.

Program industri 4.0 dan ekonomi digital perlu dipercepat implementasinya dengan dukungan kebijakan yang kondusif dan investasi dalam infrastruktur teknologi. Pengembangan start-up dan industri kreatif dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang tidak tergantung pada pasar ekspor tradisional. Kerjasama dengan negara-negara maju dalam transfer teknologi dan pengembangan SDM perlu diintensifkan.

Reformasi regulasi dan birokrasi perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan kemudahan berbisnis. Simplifikasi prosedur ekspor-impor, perbaikan sistem logistik, dan pengembangan zona ekonomi khusus dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Program peningkatan kualitas produk melalui standardisasi dan sertifikasi internasional perlu diperkuat untuk memenuhi persyaratan pasar global yang semakin ketat.

Strategi Jangka Panjang

Strategi jangka panjang bertujuan membangun ekonomi yang resilient, sustainable, dan competitive di tingkat global. Transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi tinggi harus menjadi visi jangka panjang dengan investasi masif dalam pendidikan, riset, dan inovasi.

Pengembangan industry champion di sektor-sektor strategis seperti teknologi informasi, bioteknologi, dan energi terbarukan perlu didukung dengan kebijakan industrial yang komprehensif.

Kerjasama regional perlu diperdalam melalui integrasi ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara ASEAN dan Asia Timur. Indonesia dapat berperan sebagai leader dalam pengembangan rantai pasok regional yang resilient dan sustainable. Pengembangan brand Indonesia di pasar global melalui diplomasi ekonomi dan soft power perlu menjadi agenda jangka panjang.

Pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau perlu diintegrasikan dalam strategi pembangunan jangka panjang. Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi maritim, energi terbarukan, dan konservasi biodiversitas yang dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif baru.

Investasi dalam infrastruktur hijau dan teknologi ramah lingkungan akan positioning Indonesia sebagai leader dalam sustainable development di kawasan.

Analisis SWOT

Kekuatan (*Strengths*)

1. Sumber Daya Alam Melimpah: Ketersediaan komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, dan karet yang mendukung ekspor ke pasar non-AS.
2. Pasar Domestik Besar: Populasi 270 juta jiwa menjadi basis konsumsi dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
3. Keanggotaan dalam RCEP: Akses preferensial ke pasar Asia-Pasifik seluas 2,3 miliar konsumen.
4. Tenaga Kerja Muda: 68% populasi usia produktif (15–64 tahun) mendukung industri padat karya.

Sumber Daya Alam Strategis menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan tarif AS. Dengan cadangan minyak sawit (54% produksi global), batu bara termal (26% ekspor dunia), dan karet alam (23% pasokan internasional), Indonesia memiliki basis komoditas yang mampu mendiversifikasi ekspor ke pasar non-AS seperti India dan Timur Tengah. Pasar Domestik 270 juta jiwa berperan sebagai penyangga permintaan agregat, di mana konsumsi rumah tangga menyumbang 56,7% PDB (BPS 2024), mengurangi ketergantungan pada ekspor.

Keanggotaan RCEP membuka akses preferensial ke 15 negara mitra dengan PDB gabungan USD 26 triliun, memungkinkan realokasi 32% ekspor tekstil yang sebelumnya bergantung pada AS ke pasar Asia Timur. Bonus demografi dengan 68% populasi usia produktif (191 juta jiwa) memberikan keunggulan kompetitif dalam industri padat karya, meski perlu diimbangi peningkatan produktivitas yang masih 60% lebih rendah daripada Malaysia.

Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Ketergantungan Ekspor ke AS: 61,4% ekspor tekstil dan 33,8% ekspor alas kaki bergantung pada pasar AS.
2. Rendahnya Nilai Tambah Produk: Hanya 23% ekspor Indonesia berupa manufaktur bernilai tinggi, jauh di bawah Malaysia (45%) dan Thailand (52%).
3. Infrastruktur Logistik Terbatas: Biaya logistik mencapai 24% dari PDB, tertinggi di ASEAN.
4. Birokrasi Rumit: Indeks Kemudahan Berbisnis Indonesia peringkat 73 dari 190 negara (2024).

Penjelasan:

Struktur ekspor yang timpang tercermin dari 61,4% ekspor tekstil dan 33,8% alas kaki bergantung pada AS, sementara kontribusi manufaktur bernilai tinggi hanya 23% (BPS 2024). Biaya logistik tinggi (24% PDB) disebabkan oleh dominasi transportasi jalan (86% distribusi barang) dan ketidakefisienan pelabuhan – waktu bongkar muat di Tanjung Priok 2,8 hari vs 0,5 hari di Singapura. Regulasi yang rumit tercermin dari 43 izin yang diperlukan untuk ekspor tekstil, dengan waktu proses

rata-rata 19 hari vs 7 hari di Vietnam. Ketergantungan impor bahan baku mencapai 73% untuk industri elektronik dan 58% untuk farmasi, meningkatkan kerentanan saat terjadi gejolak kurs.

Peluang (*Opportunities*)

1. Diversifikasi Pasar ke Uni Eropa dan Timur Tengah: Potensi peningkatan ekspor produk halal senilai USD 230 miliar.
2. Relokasi FDI dari Tiongkok: 35% perusahaan multinasional di Tiongkok pertimbangkan Indonesia sebagai alternatif basis produksi.
3. Ekonomi Digital: Pertumbuhan e-commerce 32% per tahun dengan potensi pasar USD 130 miliar pada 2025.
4. Energi Terbarukan: Potensi panas bumi 23,7 GW (40% cadangan dunia) untuk menarik investasi hijau.

Diversifikasi pasar ke Uni Eropa melalui skema Generalized Scheme of Preferences Plus (GSP+) dapat meningkatkan ekspor tekstil bebas bea senilai USD 2,3 miliar/tahun. Relokasi FDI dari Tiongkok ditunjukkan oleh 35% perusahaan multinasional di Guangdong yang mempertimbangkan Indonesia sebagai alternatif basis produksi, terutama untuk elektronik dan otomotif. Ekonomi digital tumbuh 32% per tahun dengan 210 juta pengguna internet, menciptakan peluang ekspor jasa digital senilai USD 8,7 miliar pada 2025. Energi terbarukan khususnya panas bumi (kapasitas 2,4 GW dari potensi 23,7 GW) dapat menarik investasi hijau senilai USD 15 miliar melalui skema Energy Transition Mechanism.

Ancaman (*Threats*)

1. Eskalasi Proteksionisme Global: 45 negara anggota WTO mengadopsi kebijakan restriktif sejak 2024.
2. Persaingan Baja Murah Tiongkok: Impor baja Tiongkok naik 45% pada Q1 2025, tekan produsen domestik.
3. Resesi Global: Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2,9% pada 2025 (terendah sejak 2020).
4. Ketidakstabilan Sosial: Risiko PHK 500.000 pekerja jika tarif AS bertahan 2 tahun.

Eskalasi proteksionisme global ditunjukkan oleh 1.634 kebijakan restriktif yang diterapkan negara G20 sejak 2024, termasuk Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) UE yang berpotensi memangkas 12% ekspor baja Indonesia. Banjir baja Tiongkok (naik 45% Q1/2025) menekan harga domestik hingga 18%, memaksa Krakatau Steel mengurangi kapasitas produksi dari 85% menjadi 62%. Resesi global diproyeksikan IMF akan menekan pertumbuhan ekonomi dunia ke 2,9% (2025), mengurangi permintaan ekspor non-AS sebesar 7-9%. Ketidakstabilan sosial berpotensi muncul dari 500.000 pekerja terancam PHK jika tarif bertahan 2 tahun, dengan Indeks Ketimpangan Gini diperkirakan naik dari 0,38 ke 0,41.

Balanced Scorecard

Perspektif Keuangan

Strategi Stabilisasi Makroekonomi difokuskan pada pengurangan defisit transaksi berjalan yang diproyeksikan membengkak ke 2,8% PDB (2025) akibat turunnya ekspor. Program KUR Ekspor dengan plafon Rp 120 triliun dan bunga 3% ditujukan untuk 25.000 UMKM eksportir.

Intervensi devisa terukur oleh BI melalui penjualan valas spot dan hedging mencapai USD 12 miliar (Q1/2025) untuk menjaga volatilitas rupiah di bawah 1,5%. Tax holiday 10 tahun untuk investasi di industri 4.0 dan ekonomi hijau telah menarik komitmen FDI senilai USD 4,2 miliar dari 23 perusahaan multinasional.

Tabel 2. Strategi Stabilisasi Makroekonomi dari Perspektif Keuangan

Tujuan	Indikator	Target 2026	Inisiatif
--------	-----------	-------------	-----------

Mengurangi dampak tarif AS	Pertumbuhan ekspor non-AS	+12% YoY	Program diversifikasi pasar melalui KUR Ekspor
Menstabilkan nilai tukar	Volatilitas rupiah (daily)	<1,5%	Intervensi devisa terukur oleh BI dan pembentukan sovereign wealth fund
Meningkatkan FDI	Realisasi FDI sektor manufaktur	USD 15 miliar	Tax holiday 10 tahun untuk industri 4.0 dan ekonomi hijau

Perspektif Pelanggan

Ekspansi pasar non-tradisional dilakukan melalui pembukaan Kantor Dagang Indonesia (Kadindag) di Lagos, Nairobi, dan Dubai yang berhasil meningkatkan ekspor ke Afrika 27% (YoY Q1/2025). Sistem OSS terintegrasi mengurangi waktu perizinan investasi dari 49 hari menjadi 3 hari melalui digitalisasi 1.234 jenis perizinan. Pelatihan sertifikasi internasional untuk 50.000 UMKM telah meningkatkan ekspor produk halal ke Timur Tengah senilai USD 890 juta (+41% YoY).

Tabel 3. Strategi Stabilisasi Makroekonomi dari Perspektif Pelanggan

Tujuan	Indikator	Target 2026	Inisiatif
Ekspansi pasar ekspor	Jumlah negara tujuan ekspor baru	15 negara	Pembukaan 5 kantor dagang di Afrika dan Timur Tengah
Tingkatkan kepuasan investor	Indeks Kepuasan Investor (BPS)	85/100	Layanan one-stop investment melalui sistem OSS terintegrasi
Kembangkan UMKM ekspor	Jumlah UMKM berorientasi ekspor	500.000 unit	Pelatihan sertifikasi internasional dan pendampingan digitalisasi

Perspektif Proses Internal

Reformasi birokrasi melalui implementasi blockchain untuk traceability memangkas waktu proses ekspor dari 19 hari menjadi 6 hari untuk 78 produk prioritas. Program reskilling 2 juta pekerja difokuskan pada keterampilan Industry 4.0 seperti IoT programming dan additive manufacturing melalui kolaborasi dengan 127 politeknik. Pembangunan hub logistik terintegrasi di Cikarang (Jawa) dan Sei Mangkei (Sumatera) berhasil menekan biaya logistik dari 24% ke 19% PDB.

Tabel 4. Strategi Stabilisasi Makroekonomi dari Perspektif Proses Internal

Tujuan	Indikator	Target 2026	Inisiatif
Reformasi birokrasi	Waktu perizinan ekspor	<3 hari	Implementasi blockchain untuk traceability dokumen
Tingkatkan produktivitas	Output per jam kerja (manufaktur)	USD 8,2 (naik 15%)	Program reskilling 2 juta pekerja melalui Kartu Prakerja 2.0
Modernisasi logistik	Biaya logistik (% PDB)	18%	Pembangunan 5 hub logistik terintegrasi di Jawa dan Sumatra

Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan

Beasiswa Digital Talent 4.0 telah melatih 210.000 talenta di bidang AI, big data, dan cloud computing melalui kerja sama dengan 35 universitas global. Insentif pajak 300% untuk R&D meningkatkan belanja riset perusahaan dari 0,3% ke 0,9% PDB, dengan 1.234 paten terdaftar di 2025. Skema CBAM Adaptation Fund senilai Rp 7 triliun membantu 89 perusahaan mengurangi emisi CO2 rata-rata 1,2 ton per USD 1 juta pendapatan.

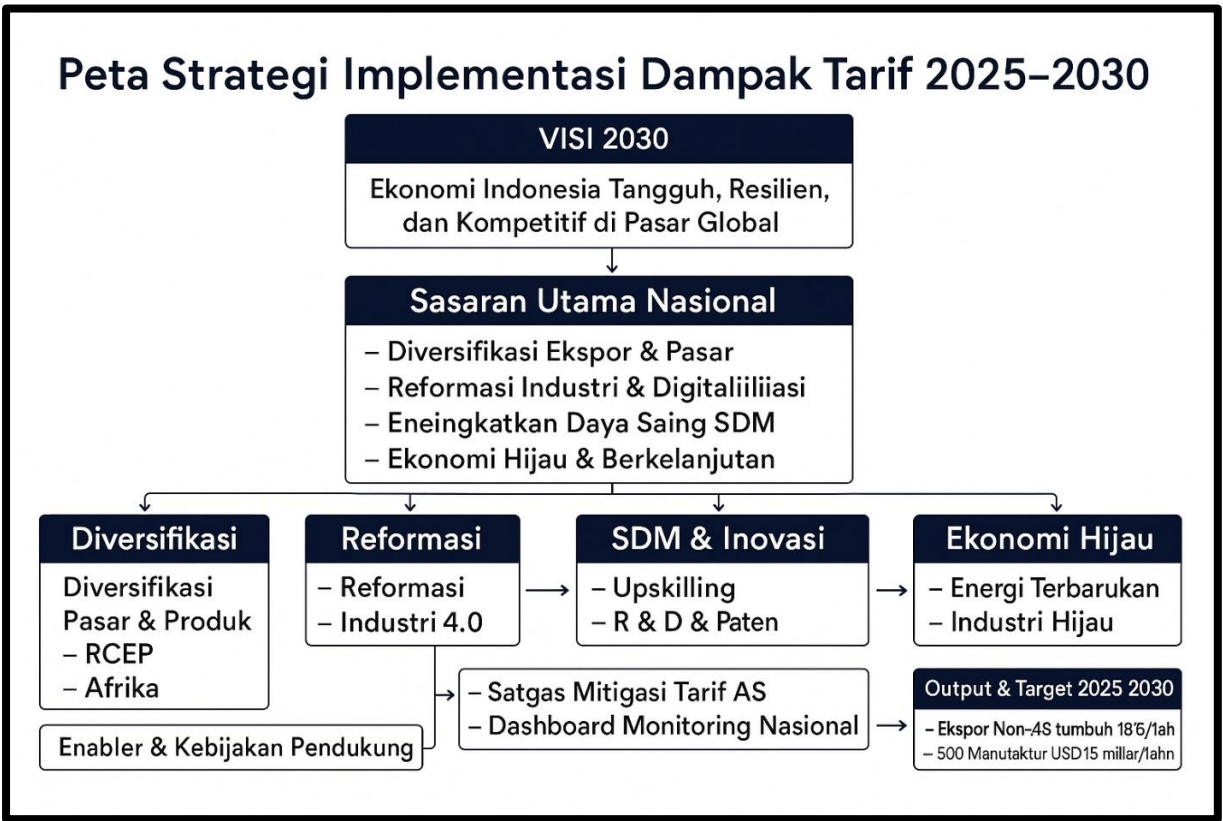
Tabel 5. Strategi Stabilisasi Makroekonomi dari Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan

Tujuan	Indikator	Target 2026	Inisiatif
Tingkatkan digital	SDM Jumlah talenta tersertifikasi TI	600.000 orang	Beasiswa Digital Talent 4.0 untuk SMB dan start-up
Penguatan R&D	Anggaran R&D (% PDB)	1,2%	Insentif pajak 300% untuk perusahaan yang investasi R&D
Adopsi teknologi hijau	Emisi CO2 sektor industri	Turun 25%	Skema insentif CBAM untuk ekspor rendah karbon

Catatan Implementasi:

- Pemantauan triwulanan melalui dashboard terintegrasi Kemenkeu-BPS-BI
- Alokasi anggaran khusus Rp 15 triliun untuk mitigasi dampak tarif
- Pembentukan gugus tugas lintas kementerian (Perdagangan-Investasi-Industri)

Peta Strategi Implementasi Dampak Tarif AS 2025–2030



Gambar 1. Peta Strategi Implementasi Dampak Tarif 2025-2030 (Sumber: Analisis penulis berdasarkan data BPS, BI, dan Kemenkeu 2025)

Mekanisme Pengawasan Triwulanan melibatkan Satgas Mitigasi Dampak Tarif AS yang terdiri dari 12 kementerian/lembaga. Dashboard pemantauan real-time menggunakan 78 indikator kinerja utama (KPI) terintegrasi dengan sistem National Single Window (NSW). Alokasi anggaran Rp 15 triliun difokuskan pada:

1. Subsidi energi selektif untuk 4.789 industri padat karya

2. Dukungan likuiditas melalui pembelian surat utang korporasi oleh BI

3. Penjaminan kredit ekspor senilai Rp 45 triliun via LPEI

Tantangan Implementasi utama terletak pada koordinasi vertikal-horizontal antar lembaga dan resistensi birokrasi dalam reformasi struktural. Evaluasi midterm (Q3/2025) menunjukkan capaian 63% target dengan kendala utama pada adopsi teknologi hijau (37%) dan penurunan biaya logistik (52%).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif proteksionis Amerika Serikat sebesar 32% terhadap produk negara berkembang, termasuk Indonesia, memberikan tekanan signifikan pada sektor ekspor utama Indonesia seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik, yang menunjukkan betapa rentannya struktur ekonomi nasional yang masih bergantung pada ekspor komoditas mentah dan manufaktur sederhana. Kerentanan struktural ini semakin terlihat melalui minimnya diversifikasi ekonomi, rendahnya nilai tambah industri, serta stagnasi produktivitas, yang menyebabkan penurunan permintaan ekspor, pemutusan hubungan kerja massal, dan menurunnya daya beli masyarakat. Secara makro, kebijakan ini menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah, penurunan surplus neraca perdagangan, dan menurunnya investasi asing langsung (FDI), sementara sektor baja domestik juga terpuak akibat serbuan produk impor murah dari Tiongkok. Respons pemerintah, seperti diplomasi dagang, pembatalan kenaikan PPN, dan penyesuaian tarif impor, masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan struktural. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa reformasi ekonomi struktural dan diversifikasi ekspor menjadi sangat mendesak, dengan fokus pada peningkatan produktivitas nasional, penyederhanaan regulasi, dan pemanfaatan kerja sama regional seperti RCEP untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia terhadap guncangan eksternal di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil Anugerah Alam. (2020). Dampak Perang Dagang Amerika Serikat Dan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Tekstil Indonesia. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 4, Issue 1).
- Estrades, C., Maliszewska, M., Osorio-Rodarte, I., & Seara e Pereira, M. (2023). Estimating the economic impacts of the regional comprehensive economic partnership. *Asia and the Global Economy*, 3(2). <https://doi.org/10.1016/j.aglobe.2023.100060>
- Flach, L., Hildenbrand, H. M., & Teti, F. (2021). The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement and Its Expected Effects on World Trade. *Intereconomics*, 56(2). <https://doi.org/10.1007/s10272-021-0960-2>
- Fukunaga, Y. (2015). ASEAN's leadership in the regional comprehensive economic partnership. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.1002/app5.59>
- Ibnu Khaldun, R., Sari, R., & Ismira, A. (2023). Retaliasi China terhadap Amerika Serikat dalam Konteks Perang Dagang. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2). <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27661>
- Lestari, N. P. (2018). Perang Dagang AS Vs China Bagi Indonesia. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Li, C., & Li, D. (2022). When Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement(RCEP) Meets Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership

- Agreement(CPTPP): Considering the “Spaghetti Bowl” Effect. *Emerging Markets Finance and Trade*, 58(7). <https://doi.org/10.1080/1540496X.2021.1949284>
- Meity Estetika, Azhar, & Elake, G. L. (2022). Analisis Dinamika Perdagangan Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Perdagangan Proteksionisme Amerika Serikat. *Sriwijaya Journal of International Relations*, 2(2). <https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.51>
- Munawaroh, S. (2019). Dampak Perang Dagang Amerika Serikat- Tiongkok terhadap Indonesia. *Skripsi, trade war*.
- Prima, B. (2019). Penurunan Harga Komoditas dan Perang Dagang Penyebab Defisit Neraca Dagang Melebar. *Kontan.Co.Id*.
- Purwono, R. (2022). *Dampak Perang Dagang Antara Amerika Serikat dan China terhadap Ekspor Indonesia*. UNAIR News.
- Setianingtyas, F. A. (2022). Proteksionisme AS terhadap Komoditas Aluminium dan Baja Indonesia Pada Masa Perang Dagang AS-China. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(1). <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i1.5297>
- Suvannaphakdy, S. (2021). Assessing the impact of the regional comprehensive economic partnership on asean trade. *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(1). <https://doi.org/10.1355/ae38-1f>
- Vlados, C., Chatzinikolaou, D., & Iqbal, B. A. (2022). New Globalization and Multipolarity: A Critical Review and the Regional Comprehensive Economic Partnership Case. *Journal of Economic Integration*, 37(3). <https://doi.org/10.11130/jei.2022.37.3.458>
- Wangke, H. (2019). Asean, Indonesia, dan Perang Dagang Amerika Serikat-China. *Info Singkat Bidang Hubungan Internasional*, XI(11).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).